

KPU Didukung, Eks Koruptor Diminta Legawa

SEMARANG - Mantan narapidana kasus korupsi diminta legawa. Meski secara hukum masih memiliki hak politik namun alangkah baiknya tak mancalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di DPRD kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI. Dengan kata lain, mendukung rancangan peraturan KPU yang melarang koruptor *nyaleg*.

(Bersambung hlm 7 kol 1)



SM/dck

KPU....

(Sambungan hlm 1)

Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr Nur Hidayat Sardini. Dia mengatakan, persoalan korupsi di Indonesia menjadi isu penting yang tak kunjung tuntas. Nominal uang negara yang diambil untuk pribadi seakan terus bertambah dan koruptor tak juga kunjung jera.

"Mestinya mereka (koruptor) tak hanya legawa, tapi juga sadar dan tak mengambil kesempatan (*nyaleg*) itu. Karena Indonesia sedang punya problem besar bemama korupsi," kata Sardini, kemarin.

Hal yang sama ia sampaikan pada 5-6 orang mantan napi koruptor yang bertanya kepadanya. Ia menyarankan tak perlu *nyaleg*. Jika tujuannya adalah ingin ikut membangun bangsa dan negara maka masih banyak bidang yang bisa dilakukan. Tak harus jadi caleg.

Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Undip ini juga mengatakan, bagi pihak yang tak sepakat dengan rancangan aturan tersebut bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung setelah aturan disahkan. Namun menurutnya, perlawanan di MA dinilai cenderung lebih mudah karena bersifat administratif. Perlawanan lebih berat jika dilakukan secara politis. Semisal, ada politikus atau partai yang menilai KPU melanggar kode etik dengan menerbitkan aturan tersebut dan melaporkannya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Secara spirit saya mendukung rancangan peraturan tersebut. Maka saat ini KPU menghadapi tantangan besar. Ada pihak-pihak yang tak sepakat melakukan perlawanan," ujarnya.

Salah satu pihak yang melakukan perlawanan bisa saja dari mantan koruptor yang berencana *nyaleg*. Menurut dia jumlah mantan koruptor yang akan *nyaleg* banyak dan terbagi di DPRD kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI. Namun yang terbanyak dinilai akan *nyaleg* di DPR RI.

Terpisah, keberanian KPU menolak mantan koruptor masuk dalam pencalegan di Pileg 2019, dinilai sebagai langkah yang maju dan berani. Langkah tersebut dinilai penting dilakukan untuk

menyeleksi sejak awal calon wakil rakyat yang berintegritas.

"Sehingga nanti KPU tidak bisa disalahkan jika pada kemudian hari, wakil rakyat yang terpilih ada yang melakukan praktik korupsi, karena sejak awal sudah disiapkan regulasinya," kata pakar hukum pidana khusus dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho, Jumat (1/6).

Menurutnya, sikap tegas perlu dilakukan sejak awal oleh penyelenggaraan pemilu, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan bukan karena memenuhi kebutuhan, namun karena sifat tamak, rakus menumpuk kekayaan dengan menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya.

"Yang dirugikan kan negara dan rakyat, sehingga kalau larangan ini dijalankan, ini juga selaras dengan visi Presiden Jokowi untuk revolusi mental," kata guru besar yang konsen di masalah penanganan korupsi ini.

Kemungkinan KPU mendapat perlawanan hukum, kata Hibnu, kalau sudah menjadi kesepakatan politik hukum negara, mestinya ini tidak menjadi masalah. Jika ada gugatan, itu merupakan hal tersendiri. Artinya, KPU sudah ikut memikirkan calon wakil-wakil rakyat yang bersih dan perbuatan tercela.

"Kalau misalnya nantinya regulasi KPU dimentahkan gugatan parpol atau caleg mantan napi korupsi, ya tidak masalah. Langkah maju KPU ini yang menurut saya patut diberi apresiasi," ujarnya.

Sementara bagi partai politik, katanya, ini akan menjadikan evaluasi total bahwa masalah korupsi merupakan perbuatan yang tercela. Karena itu, partai semestinya mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Parpol, saran dia, sebaiknya mengikuti aturan KPU, sehingga harus cerdas menyiapkan kadernya.

"Pemilih sudah pandai dalam menilai caleg, sehingga jangan sampai parpol nanti ditinggalkan pemilih," tambahnya.

Untuk kalangan *civil society* dan pejuang antikorupsi, kata dia, pasti akan selalu memberi dukungan pemikiran maupun kampanye dan terus mendorong yang terbaik bagi bangsa, karena saat ini Indonesia krisis panutan. (H81,G22-56)